



## Analisis Kebijakan SPNF- SKB Kota Medan

Khadijah Tussolihin Dalimunthe<sup>1\*</sup>, Oriza Salsabila<sup>2</sup>,

Marisa Nabila<sup>3\*</sup> Fatma Amelia<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Korespondensi Penulis : [marisanabila1506@gmail.com](mailto:marisanabila1506@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to analyze the policies implemented by SPNF-SKB Medan City in providing non-formal education for the community. This institution plays an important role in providing equal access to education, skills training and socio-cultural development. This research uses a descriptive method with a qualitative approach involving interviews and field observations. The research results show that the programs held at SPNF-SKB Medan City, such as Packages A, B, and C, have contributed greatly to improving the education of people who do not have access to formal education. Apart from that, the skills training provided is able to improve people's abilities in the world of work and entrepreneurship. However, budget constraints are the main challenge in developing this educational service. This research suggests the need for further support from the government and collaboration with other institutions to overcome these barriers and expand the reach of non-formal education services.*

**Keywords:** *SPNF- SKB, Education Policy, Non-Formal Education.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh SPNF-SKB Kota Medan dalam menyediakan pendidikan nonformal bagi masyarakat. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memberikan akses pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang diselenggarakan di SPNF-SKB Kota Medan, seperti Paket A, B, dan C, berkontribusi besar dalam peningkatan pendidikan masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam mengembangkan layanan pendidikan ini. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk mengatasi hambatan tersebut dan memperluas jangkauan layanan pendidikan nonformal.

**Kata Kunci:** SPNF- SKB, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Non Formal

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan tiga jalur pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.” Sedangkan pengertian pendidikan non formal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.” Pengertian pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan di keluarga ataupun lingkungan. Ketiga jalur pendidikan tersebut dibentuk untuk saling melengkapi guna mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar jalur formal yang

dilaksanakan sebagai salah satu implementasi dari pendidikan sepanjang hayat. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam pasal 31 ayat 1 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Berbeda dengan pendidikan formal yang terbatas pada umur, pendidikan non formal tidak terbatas pada umur, artinya siapapun dapat mendapatkan pembelajaran. Pendidikan non formal dapat ditempuh dari mulai 0 tahun sampai lansia sehingga pendidikan non formal memperluas kesempatan bagi orang-orang yang tidak terjangkau pendidikan formal. Secara garis besar Pendidikan non formal dibagi menjadi tujuh ranah yakni meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah lembaga pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Lembaga ini berperan dalam penyelenggaraan berbagai program pembelajaran yang mencakup pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan sosial budaya. SKB menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai usia, terutama mereka yang putus sekolah, untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. SKB juga dirancang sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat yang berorientasi pada pendidikan sepanjang hayat. SKB pertama kali didirikan pada tahun 1968 dan telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal program dan kegiatan yang ditawarkan. Awalnya, SKB berfokus pada pendidikan dasar dan menengah nonformal, seperti Paket A, B, dan C, yang setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Program-program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan diakui secara nasional. Selain pendidikan kesetaraan, SKB juga menyelenggarakan berbagai kursus keterampilan yang bertujuan menyiapkan masyarakat untuk bekerja atau berwirausaha.

Awalnya, SKB difokuskan pada pendidikan dasar hingga menengah bagi mereka yang tidak sempat menamatkan pendidikan formal. Melalui program pendidikan kesetaraan seperti Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA), SKB membantu masyarakat mendapatkan ijazah yang diakui secara resmi oleh negara. Selain itu, SKB juga memainkan peran penting dalam penyiapan keterampilan kerja melalui program-program kursus dan pelatihan yang bervariasi, mulai dari keterampilan teknis seperti menjahit, komputer, hingga keterampilan wirausaha. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, serta menciptakan kesempatan bagi peserta didik untuk

berpartisipasi dalam dunia kerja. Secara historis, SKB pertama kali muncul pada akhir tahun 1960-an sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif di tengah masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam perkembangannya, SKB tidak hanya fokus pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga menyediakan berbagai program yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan hidup (life skill). Misalnya, banyak SKB yang menawarkan pelatihan di bidang pertanian, tata boga, kecantikan. SKB tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar bagi individu, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Misalnya, SKB sering kali bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), serta lembaga-lembaga internasional untuk melaksanakan berbagai proyek pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan. Dalam kerangka ini, SKB mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan kapasitas dalam masyarakat menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, SKB tidak hanya menjadi institusi pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial di masyarakat. SKB juga memainkan peran penting dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata

Dalam hal penyebarannya, SKB telah didirikan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki angka putus sekolah tinggi dan tingkat ekonomi rendah. Pemerintah melalui Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) terus mendukung penguatan kapasitas SKB, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, SKB juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan dukungan infrastruktur, yang terkadang menghambat optimalisasi kinerja mereka. Melalui peran multifungsinya sebagai lembaga pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan, SKB terus menjadi elemen kunci dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya di Indonesia. Dukungan yang konsisten dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta keterlibatan masyarakat dan mitra-mitra strategis lainnya sangat penting dalam menjamin keberlangsungan program-program SKB dan dampak positif.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan wawancara dan observasi lapangan sebagai metode pengumpulan data utama.

Fokus penelitian adalah memahami fenomena secara mendalam, khususnya program-program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang kebijakan yang diterapkan oleh SPNF-SKB Kota Medan. Penelitian ini mengamati bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap pendidikan nonformal.

Metode ini sesuai dalam menganalisis kebijakan karena memberikan ruang untuk eksplorasi mendalam tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan ini juga relevan untuk mendapatkan perspektif langsung dari pengelola dan peserta program pendidikan nonformal di SKB.

### **3. HASIL PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran di lembaga SPNF-SKB KOTA MEDAN dalam menjalankan perannya dan program-program yang telah ditentukan untuk dikembangkan.

#### **Gambaran umum SPNF- SKB KOTA MEDAN**

SKB Kota Medan merupakan salah satu sekolah jenjang SKB berstatus Negeri yang berada di wilayah Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. SKB Kota Medan didirikan pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Nomor SK Pendirian PERWAL No.3 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Sekolah SKB Kota Medan saat ini adalah Nurasih. Operator yang bertanggung jawab adalah Muhammad Zailani, S. Pd. Dengan adanya keberadaan SKB Kota Medan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Medan Barat, Kota Medan.

#### **VISI MISI DAN TUJUAN SPNF-SKB KOTA MEDAN**

##### **VISI**

- Mendidik masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan
- Melaksanakan program program yang melibatkan masyarakat
- Membangun partisipasi masyarakat untuk memiliki karakter pribadi dan akhlak yang mulia.

##### **MISI**

- Learning By Doing Learning To Do Learning To Be
- Learning To Life Together

##### **TUJUAN**

- Memberantas buta aksara di wilayah kerja UPT SPNF-SKB KOTA MEDAN, Melalui Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KM) dan Pendidikan Multi Keaksaraan
- Menuntaskan wajib belajar 12 tahun bagi warga masyarakat yang putus sekolah dengan berbagai factor melalui Pendidikan Non Formal dan Informal
- Mendidik menanamkan pendidikan karakter kepada anak usia dini , melalui program pendidikan anak usia dini
- Memberdayakan warga belajar yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah, melalui pendidikan kecakapan hidup (PHK)
- Pendidikan Kewirausahaan masyarakat (PKM) dengan memberikan keterampilan sesuai dengan potensi daerah yang ada sehingga dapat dikembangkan didaerah guna menambah penghasilan keluarga.

SPNF-SKB Kota Medan adalah lembaga pendidikan nonformal yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pendidikan kesetaraan, PAUD, dan keterampilan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan yang diterapkan di SKB Kota Medan melalui wawancara dan observasi, dengan fokus pada relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun program-program yang ada di SKB Kota Medan menyelenggarakan beberapa program pendidikan nonformal, antara lain:

1. Paket Kesetaraan: Program ini mencakup Paket A, B, dan C yang setara dengan pendidikan formal di tingkat SD, SMP, dan SMA.
2. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini): Bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak usia dini melalui metode belajar sambil bermain.\
3. Life Skills: Program keterampilan hidup yang meliputi pelatihan menjahit, membuat kerajinan dari bahan bekas, dan merangkai bunga akrilik.

Kebijakan SKB Kota Medan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, namun terdapat penyesuaian lokal, terutama untuk peserta di atas usia 24 tahun. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa:

- A. Peserta di atas 24 tahun tidak lagi dibiayai oleh pemerintah.
- B. Pembelajaran wajib mengikuti struktur yang sama dengan pendidikan formal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran di SKB Kota Medan dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. SKB hanya dapat mendanai 5-6 peserta per program, sementara peserta lain harus menggunakan biaya pribadi. Tetapi partisipasi masyarakat cukup baik, terutama pada program

kesetaraan. Permintaan untuk kelas tatap muka menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan nonformal yang ditawarkan oleh SKB.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, analisis kebijakan SPNF-SKB Kota Medan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan teori dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan nonformal.

1. Kesesuaian dengan teori pendidikan nonformal kebijakan yang diterapkan di SKB Kota Medan sesuai dengan teori pendidikan nonformal yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. SKB menyediakan program yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan hidup. Hal ini sejalan dengan teori yang menekankan bahwa pendidikan nonformal harus berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pemberdayaan masyarakat.
2. Fleksibilitas kebijakan dan adaptasi lokal kebijakan untuk peserta di atas usia 24 tahun yang harus menggunakan biaya mandiri mencerminkan adaptasi terhadap keterbatasan anggaran. Meskipun ini sesuai dengan teori tentang efisiensi pengelolaan sumber daya, hal ini juga menunjukkan perlunya kebijakan tambahan untuk mendukung kelompok usia yang tidak terjangkau pendidikan formal.
3. Pelaksanaan program yang ada di SKB, seperti life skills dan pendidikan kesetaraan, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan nonformal harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah peserta yang dapat didanai menjadi tantangan implementasi yang perlu diatasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
4. Dampak positif terhadap masyarakat tingginya partisipasi masyarakat dalam program kesetaraan menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil menarik minat peserta didik. Teori pendidikan nonformal juga menekankan pentingnya partisipasi aktif sebagai indikator keberhasilan program. Kebutuhan akan pembelajaran tatap muka juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa interaksi langsung meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Kebijakan SPNF SKB Kota Medan juga mencakup pengelolaan sumber daya yang efektif, baik dari segi tenaga pengajar maupun fasilitas. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk menunjang kualitas pendidikan nonformal yang diberikan. Oleh karena itu, SKB berusaha untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional. SPNF SKB Kota Medan telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, maupun lembaga swasta, Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas program melalui

dukungan sumber daya tambahan serta berbagi pengalaman terbaik.

SKB berfungsi mengembangkan potensi peserta didik (warga masyarakat) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dengan demikian jelas kiranya bahwa melalui pelayanan kesetaraan benar-benar dapat menjadi sarana pendidikan mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga pada hubungan dapat mewujudkan masyarakat gemar belajar (learning society), terciptanya lapangan kerja berbasis kebutuhan masyarakat yang menuju kemandirian untuk mencapai kesejahteraannya.

#### **4. DISKUSI**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di SKB Kota Medan sejalan dengan konsep pendidikan nonformal dalam teori kebijakan pendidikan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal dan memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat. Menurut teori pendidikan nonformal oleh Sudarmaji (2020), pendidikan nonformal harus berorientasi pada kebutuhan lokal dan fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Hasil penelitian mendukung hal ini karena program-program di SKB dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, keterbatasan dana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Program life skills di SKB meningkatkan keterampilan praktis peserta, yang sesuai dengan konsep "life-long learning" sebagaimana disebutkan oleh Purnamaningsih (2021). Namun, keterbatasan partisipasi akibat biaya mandiri bagi peserta dewasa menunjukkan perlunya dukungan finansial yang lebih kuat dari pemerintah.

Shomedran (2020) menekankan pentingnya sumber daya yang memadai dalam pendidikan nonformal. Tantangan di SKB Kota Medan, seperti minimnya fasilitas dan anggaran, mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada membutuhkan penguatan dalam alokasi anggaran dan kemitraan strategis. Widodo (2015) menyebut bahwa keberhasilan program pendidikan nonformal sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan sinergi dengan pemerintah daerah. Tingginya permintaan pembelajaran di SKB Kota Medan menunjukkan keberhasilan dalam aspek partisipasi, namun kesinambungan program membutuhkan alokasi sumber daya yang lebih baik.

Menurut hasil wawancara, SKB Kota Medan menyediakan beberapa program pendidikan nonformal, yaitu paket kesetaraan (untuk siswa yang ingin mendapatkan pendidikan setara dengan sekolah formal), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan program life skill atau keterampilan hidup. Program kesetaraan ini menjadi solusi bagi mereka yang

tidak sempat mengikuti pendidikan formal, sedangkan PAUD membantu membentuk pendidikan dasar bagi anak-anak. Selain itu, program keterampilan hidup membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian mereka, seperti membuat kerajinan dan menjahit.

Kebijakan di SKB Kota Medan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dengan penyesuaian untuk peserta didik yang berusia di atas 24 tahun. Dalam kasus ini, biaya pendidikan tidak lagi ditanggung oleh pemerintah dan peserta didik harus mendanai pendidikan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SKB berupaya memberikan akses pendidikan seluas-luasnya, ada keterbatasan dalam hal pendanaan bagi peserta yang sudah melewati usia belajar formal.

Kebijakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Medan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam pasal 26 ayat 1-4, dijelaskan bahwa:

- a). Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- b). Pendidikan ini bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal.
- c). Satuan pendidikan nonformal, termasuk SKB, diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan sepanjang hayat.

SKB Kota Medan berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal yang diatur oleh kebijakan pemerintah, termasuk implementasi program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan SKB Kota Medan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nonformal yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu:

- a). SKB Kota Medan menyediakan program yang tidak dibatasi usia, memungkinkan partisipasi masyarakat dari anak-anak hingga lanjut usia. Program ini memberikan peluang belajar sepanjang hayat.
- b). Kesesuaian dengan kebutuhan lokal seperti pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), keterampilan hidup (life skills), dan PAUD dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Medan.
- c). SKB bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi buta aksara, mendukung wajib belajar 12 tahun, dan meningkatkan keterampilan kerja serta kewirausahaan.



## 5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di SPNF-SKB Kota Medan telah sejalan dengan teori pendidikan nonformal dan peraturan yang berlaku. Program-program yang diselenggarakan relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan kesetaraan dan keterampilan hidup, yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat kendala utama dalam hal pendanaan yang membatasi jumlah peserta didik yang dapat dijangkau. Oleh karena itu, keberlanjutan dan inklusivitas program membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah maupun pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nonformal secara menyeluruh.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Dougherty, D., & Pritchard, A. (1985). In Bauer, A. (2003). Konsep relevansi peran lembaga pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan evaluasi implementasi kebijakan.
- Marzuki, M. (2012). Definisi dan konsep pendidikan nonformal dalam konteks pemberdayaan masyarakat: *Pendidikan Nonformal: Implementasi dan Pengembangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mudanifah, S. (2019). Peran pengelola SKB sebagai upaya meningkatkan kinerja. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*.
- Peran Sanggar Kegiatan Belajar dalam Pengembangan Masyarakat. (2023). *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 12(2), 55-68.
- Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
- Purnamaningsih, S. (2021). Efektivitas kebijakan pemerintah. *Al- Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1-15.
- Pusat Penelitian Pendidikan. (2022). *Evaluasi Program Sanggar Kegiatan Belajar di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sedarmayanti, R. (2018). Analisis kinerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi*, 1(2), 65-87.
- Shomedran, M. (2020). Peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan. *Jurnal Comm-Edu*, 271-277.
- Smith, J. (2023). Peran Sanggar Kegiatan Belajar dalam Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 12(2), 55-68.
- Sudarmaji, A. (2020). *Pendidikan Nonformal di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyediakan dasar hukum bagi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Indonesia, termasuk peran lembaga pendidikan seperti SKB.

Widodo, M. (2015). Pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 94-106.